

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut BPS (2021), indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia merupakan pengertian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan sebuah indikator komposit yang diperkenalkan dan dirancang oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990. IPM memberikan penjelasan mengenai tingkat akses penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan sebagainya (Sikana & Wijayanto, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengompositkan 3 dimensi, yaitu kesehatan, pendapatan, dan pendidikan (Kurniawan et al., 2024).

Salah satu unsur dari IPM adalah kesehatan. Indikator kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang didapatkan dari hasil sensus penduduk yang memang rutin dilakukan oleh BPS secara berkala. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan peluang seseorang mempunyai umur di daerah tersebut sejak lahir hingga meninggal. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengatasi penyakit, penyediaan akses layanan kesehatan, dan kondisi kehidupan yang sehat (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam suatu negara, kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah harus memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat karena kesehatan ini sangat berpengaruh pada banyak hal. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup di atas adalah dengan memantau status Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang di dalamnya terdapat informasi mengenai peningkatan atau penurunan nilai maupun peringkat status kesehatan di tingkat kabupaten/kota (Dharmayanti & Tjandararini, 2017). Pemerintah melakukan pemantauan terhadap IPKM merupakan bentuk tanggung jawab dalam memperhatikan masyarakat, terutama dalam kesehatan.

Menurut Kemenkes RI dalam (Noerjoedianto & Putri, 2020), Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dapat menentukan peringkat kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan, meliputi indikator komposit yang memberikan gambaran kemajuan pembangunan kesehatan yang dirumuskan berdasarkan data kesehatan yang berbasis komunitas. Data tersebut meliputi Survei Potensi Desa (Podes), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Indikator yang dipilih dalam IPKM memperlihatkan dampak dari pembangunan kesehatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, IPKM juga bisa dijadikan bahan acuan pemerintah daerah (Pemda) dalam merumuskan program atau regulasi yang lebih tepat, sebagai bahan

advokasi untuk mendorong Pemda dalam meningkatkan peringkat kesehatan, serta dalam menetapkan daerah bermasalah kesehatan berat atau khusus (DBKKBK). IPKM juga berfungsi sebagai pedoman untuk penentuan alokasi dana bantuan kesehatan yang akan diberikan pemerintah pusat kepada daerah serta mendukung Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) dalam pengembangan kabupaten/kota, menurut Kementerian Kesehatan RI (Noerjoedianto & Putri, 2020).

Pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 13 dalam indeks ketahanan kesehatan global dibandingkan negara yang termasuk dalam G20. Menduduki peringkat 13 membuktikan bahwa Indonesia masih kurang dalam hal kesehatan, walaupun sudah mempunyai banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang memadai (Putri, 2023). Presiden Joko Widodo juga menerangkan bahwa masyarakat Indonesia yang pergi untuk berobat ke Malaysia mencapai hampir 1 juta, kemudian sebanyak 750 ribu masyarakat pergi ke Singapura, dan sisanya ke Amerika Serikat, Jepang, hingga Jerman.

Kemudian Indonesia menempati peringkat 39 dari 110 negara dalam penilaian kesehatan yakni laporan Indeks Layanan Kesehatan majalah CEO world edisi 2024 (Sayidah, 2024). Peringkat tersebut membuat Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan negara sekitar, yaitu Thailand di urutan 83 dan

Malaysia di urutan 88 meskipun Indonesia tetap berada di peringkat yang sama dengan tahun 2023. Aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian Indeks Pelayanan Kesehatan Global adalah biaya kesehatan (dalam dolar AS per kapita), infrastruktur medis, kompetensi tenaga kesehatan, tingkat kesiapan pemerintah dalam mendukung layanan kesehatan, dan penyediaan obat dengan kualitas yang baik. Selain aspek yang telah disebutkan terdapat beberapa pertimbangan lainnya, yaitu akses air bersih, sanitasi, kondisi lingkungan, dan kesiapan pemerintah terhadap risiko kesehatan yang akan muncul dalam penerapan kebijakan.

Provinsi Jawa Timur untuk Indeks Kesehatannya mencapai 0,84 di tahun 2023. Berikut adalah Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun:

Tabel 1.1 Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2020-2023

Tahun	Indeks Kesehatan
2020	0,834
2021	0,835
2022	0,84
2023	0,844

Sumber: Laporan Kinerja Dinkes 2023

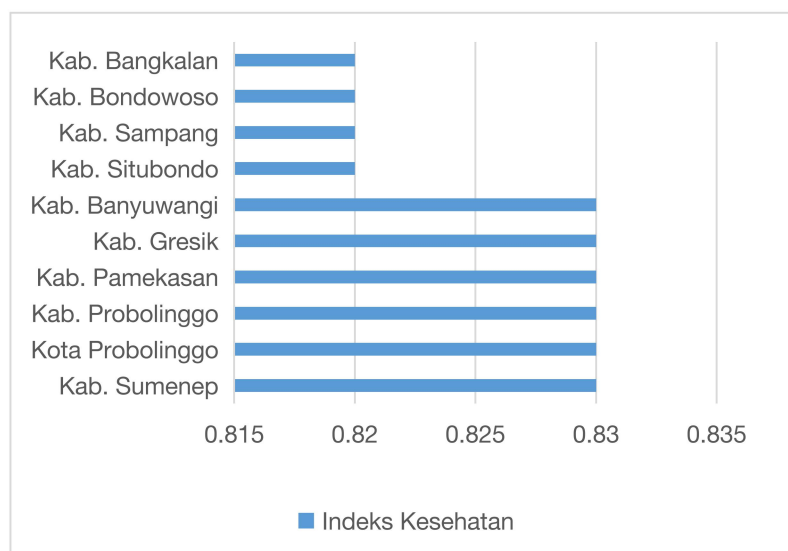
Berdasarkan data di atas, bisa terlihat bahwa Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 0,001 persen di tahun 2021 dan 0,005 di tahun 2022. Target Provinsi Jawa Timur dalam Indeks Kesehatan pada tahun 2023 adalah 0,798 dan berhasil mencapai 0,844 dengan pencapaian sebesar 105,76 yang artinya berhasil melebihi 0,046 dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Jawa Timur berhasil dalam mencapai

target Indeks Kesehatan yang telah ditentukan, tentunya dengan program-program yang merupakan usaha dalam mencapai target tersebut.

Program-program yang dijalankan oleh pemerintah mengenai kesehatan tidak selalu berhubungan dengan lembaga kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, namun bisa juga program dilaksanakan oleh dinas-dinas yang terkait, seperti misalnya program Pelayanan Instruktur Senam Gratis (PING) yang dijalankan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Semenjak sistem desentralisasi diterapkan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan masing-masing dalam mengatur daerahnya. Menurut Rukayat dalam (Nurmandi et al., 2021), paradigma desentralisasi membuat masyarakat lebih peka untuk meminta kualitas pelayanan publik (*public service*) yang memang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah.

Menurut Sinambela dalam (Robial et al., 2023), kegiatan yang memberikan keuntungan, dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau suatu kumpulan dan memberikan penawaran berupa kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat merupakan pengertian dari pelayanan publik. Berdasarkan pendapat tersebut bisa memberikan pengertian bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa pelayanan jasa publik

maupun barang publik adalah pengertian dari pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri telah mengalami berbagai perubahan. Pemerintah diharuskan adaptif terhadap perubahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan dasar.



Gambar 1.1 Indeks Kesehatan 10 Kabupaten/Kota Terbawah di Provinsi Jawa Timur 2023

Sumber: BPS Kota Malang

Data di atas merupakan 10 kabupaten/kota dengan Indeks Kesehatan terendah di Provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa kabupaten/kota memiliki nilai yang sama, jadi peneliti mengurutkan berdasarkan huruf alfabet bagi kabupaten/kota yang memiliki nilai sama.

Di Pulau Madura terdapat 4 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten terkecil di antara tiga kabupaten lainnya yang ada di Pulau Madura yang dibuktikan dengan Kabupaten

Bangkalan memiliki luas 1.301,03 km², Kabupaten Sampang memiliki luas 1.228,25 km², Kabupaten Sumenep dengan luas 2.084,02 km², sedangkan Kabupaten Pamekasan hanya 795,15 km². Berikut adalah data Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan:

Tabel 1.2 Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan 2019-2023

Tahun	Indeks Kesehatan
2019	0,730
2020	0,814
2021	0,815
2022	0,819
2023	0,823

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan data di atas, peningkatan Indeks Kesehatan yang terjadi pada tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan naik sebanyak 0,08 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Kota Surabaya yang Indeks Kesehatan masyarakatnya mencapai 0,86 di tahun 2023 (BPS Kota Malang, 2023), sedangkan Kabupaten Pamekasan di angka 0,82 di tahun 2023 maka Kabupaten Pamekasan bisa dikatakan Indeks Kesehatannya masih rendah meskipun setiap tahunnya meningkat. Selain itu, Indeks Kesehatan Kabupaten Pamekasan juga masih di bawah rata-rata Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 0,84 di tahun 2023.

Minat senam atau tingkat gemar berolahraga masyarakat Kabupaten Pamekasan lumayan tinggi jika dilihat dari jumlah peminat senamnya namun

mempunyai keterbatasan dalam biaya, hal tersebut berdasarkan penuturan pihak Disporapar Kabupaten Pamekasan yang didapatkan peneliti ketika melakukan pra penelitian. Berikut adalah data minat senam di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023:

Tabel 1.3 Jumlah Peminat Senam Kabupaten Pamekasan 2023

Lokasi	Jumlah Peminat Senam
Sekolah	6.097
Instansi Pemerintahan	1.106
Desa/Kelurahan	1.258
Masyarakat Umum	663

Sumber: Disporapar Kabupaten Pamekasan

Kemudian permasalahan selanjutnya adalah sulitnya masyarakat menerapkan pola sehat dan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit yang masih agak tinggi (Dinas Kesehatan Pamekasan, 2020). Peserta jaminan kesehatan Kabupaten Pamekasan hanya di angka 24,53% (BPS, 2021) sehingga pembiayaan kesehatan belum cukup dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan kesehatan. Jadi dalam menangani permasalahan di atas diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau yang disebut kolaborasi.

Kolaborasi bisa menjadi alternatif solusi karena akan melibatkan beberapa pihak yang akan menjalankan tugasnya masing-masing yang disesuaikan dengan kemampuan sehingga bisa lebih efisien. Kolaborasi yang dilakukan dengan baik akan memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang

dapat mendukung inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan serta memastikan penggunaan dana APBD yang efektif dan berkelanjutan (Zulfa, 2023).

Salah satu upaya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah adanya program Pelayanan Instruktur Senam Gratis (PING) yang dijalankan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pamekasan. Inovasi program PING ini mempunyai dasar hukum, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pada poin kedua yang salah satunya menyebutkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga diminta untuk memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat. Program ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023. Berikut adalah jumlah data pengajuan proposal Program PING pada tahun 2023:

Tabel 1.4 Pengajuan Instruktur Senam Gratis 2023

Bulan	Jumlah Pengajuan
Januari	0
Februari	1
Maret	1
April	0
Mei	1
Juni	4
Juli	17
Agustus	14
September	10
Oktober	12
November	9
Desember	1

TOTAL	70
--------------	-----------

Sumber: Disporapar Kabupaten Pamekasan

Selama setahun, pengajuan instruktur senam gratis hanya di angka 70 pengajuan. Pengajuan banyak dilakukan pada bulan juli dan agustus karena terdapat momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia yang memang biasanya terdapat banyak agenda di masyarakat, seperti salah satu contohnya adalah kegiatan Jalan-Jalan Sehat (JJS) tingkat RT maupun kabupaten. Dalam kegiatan JJS tersebut seringkali ditutup dengan kegiatan senam bersama. Sedangkan pada awal-awal program, bahkan tidak ada pengajuan sama sekali dalam satu bulan.

Memang biasanya pada awal-awal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program ini. Publikasi yang dilakukan oleh Disporapar Kabupaten Pamekasan masih minim sekali. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan Ibu Lely sebagai masyarakat Kabupaten Pamekasan yang hingga saat ini belum mengetahui adanya program ini.

“Itu program apa mbak? Saya belum pernah dengar sebelumnya. Saya mengetahui adanya senam gratis itu hanya di hari minggu ketika ada CFD saja”

(Lely, Masyarakat Umum, 16 Januari 2025).

Publikasi hanya dilakukan melalui sosial media Disporapar Kabupaten Pamekasan, yakni Instagram dan YouTube padahal realita yang terjadi adalah tidak semua masyarakat mengikuti akun-akun pemerintahan, seperti dinas-dinas.

Dalam website resmi Disporapar juga tidak ada informasi mengenai pelayanan ini, hanya berisikan sedikit gambar pelaksanaan program. Seharusnya dalam website resmi Disporapar menampilkan berbagai layanan informasi yang bisa diakses oleh semua masyarakat, dengan begitu program PING ini lebih tersebarluaskan. Kemudian terlihat bahwa publikasi yang dilakukan hanya dari satu pihak saja, yakni Disporapar Kabupaten Pamekasan. Dalam publikasi ini, tidak terlihat upaya pihak lain dalam melakukan penyebaran informasi. Namun pada tahun 2024, pengajuan instruktur senam mengalami peningkatan. Berikut adalah jumlah data pengajuan proposal program PING pada tahun 2024:

Tabel 1.5 Pengajuan Instruktur Senam Gratis 2024

Bulan	Jumlah Pengajuan
Januari	17
Februari	13
Maret	9
April	2
Mei	9
Juni	9
Juli	13
Agustus	26
September	14
Oktober	8
November	10
Desember	0
TOTAL	130

Sumber: Disporapar Kabupaten Pamekasan

Senam sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dapat membantu tubuh tetap bugar. Selain itu, senam dilakukan dengan gerakan yang selaras dengan

ritme. Senam dengan gampang dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai keinginan. Secara berkelompok ataupun mandiri, senam tetap bisa dilakukan. Senam juga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti daya tahan dan kekuatan. Selain itu senam merupakan gerakan yang dapat melatih kebugaran tubuh dan juga menambah stamina sehingga membuat badan lebih sehat (Aulia, 2021).

Senam termasuk salah satu jenis olahraga yang dapat membantu badan lebih sehat. Salah satu manfaat olahraga yakni masyarakat akan terhindar dari penyakit kurang gerak yaitu penyakit hipokinetik. Hipokinetik merupakan penyakit yang dapat menyerang manusia dikarenakan kurangnya bergerak. Dalam hal ini, penderita penyakit hipokinetik akan terserang penyakit kanker, jantung, kegemukan dan penyakit lainnya (Herliana et al., 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut, senam bisa menjadi salah satu alternatif olahraga yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat sehingga bisa terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, senam juga mempunyai gerakan yang berirama dan diiringi dengan musik dan tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Program PING ini memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa penyediaan instruktur senam gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggaran Disporapar dalam program ini adalah Rp 50.000.000,00 di tahun 2023. Pengajuan bisa dilakukan untuk berbagai kalangan, mulai dari sekolah, kelurahan, dan desa yang memerlukan adanya instruktur senam gratis. Alur pengajuan pelayanan ini juga mudah, berikut alur pengajuannya: 1) Membuat surat permohonan pelayanan instruktur senam gratis, untuk templatnya disesuaikan dengan masing-masing pemohon yang memuat informasi permohonan tanggal, waktu, serta tempat kegiatannya, 2) Kemudian kirimkan surat permohonan tersebut ke Disporapar Kabupaten Pamekasan di kantor bagian pelayanan, 3) Cantumkan contact person saat mengajukan permohonan di Disporapar Kabupaten Pamekasan sebagai kontak yang akan dihubungi nantinya, 4) Setelah itu tinggal menunggu balasan dari Disporapar Kabupaten Pamekasan, biasanya balasan ini bisa melalui aplikasi WhatsApp untuk mengkonfirmasi kembali tanggal, waktu, serta tempat kegiatan.

Pengajuan juga bisa memilih jenis senam apa yang diinginkan, disesuaikan dengan keperluan. Terdapat beberapa pilihan, seperti *aerobic*, zumba, jantung sehat, *bodycore*, *steprobic*, *dance fit*, *trampoline*, *pilates*, *pound*, dan yoga. Untuk sekolah-sekolah biasanya melakukan senam *aerobic* karena memang tidak memerlukan alat serta gerakan-gerakan yang dilakukan termasuk mudah untuk dipraktekkan selain itu, senam *aerobic* merupakan senam paling umum

yang dikenal oleh masyarakat. Untuk tempat pelaksanaan senam, ditentukan oleh pengajuan. Jadi masyarakat bisa memilih mau melakukan senam dimana. Seperti misalnya sekolah yang melakukan pengajuan, biasanya akan dilaksanakan di lapangan milik sekolah.

Dalam program ini melakukan kolaborasi mengingat kebijakan dari pemerintah yang masih susah diadopsi menjadi rencana kerja, terutama di daerah. Seperti dalam penelitian yang berjudul “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Stunting Di tengah Pandemi Covid-19” yang menyebutkan bahwa kepemimpinan dalam kolaborasi masih bersifat sentralistik dalam pengambilan kebijakan dan lemah dalam mengakomodir sumber daya dukungan dari luar, seperti swasta, media, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi (Sauji, 2021). Dengan menggunakan *Collaborative Governance* diharapkan bisa mengimplementasikan lebih baik kebijakan dalam bentuk rencana kerja dengan target yang ditentukan.

Collaborative Governance merupakan pembaruan dari model *governance* yang muncul menjadi strategi baru menggantikan model-model implementasi dan pengambilan kebijakan terdahulu. Dalam proses kolaborasi, model ini mengikutsertakan banyak pihak yang menjalankan perannya masing-masing, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Keterlibatan para pihak mempunyai

tujuan untuk tercapainya konsensus dalam pengambilan suatu keputusan (Ansell & Gash, 2008).

Menurut Wardiyanto dalam (Avitadira & Indrawati, 2023), konsep *Collaborative Governance* mengkaji kerja sama regional antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah guna membentuk kemitraan antara sektor publik dan swasta. Dalam konsep ini, peran aktor publik, swasta, dan masyarakat dijelaskan melalui proses kolaboratif yang bertujuan menciptakan kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan publik atau masyarakat. Selain itu, konsep tersebut menekankan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama serta kesejahteraan masyarakat luas.

Collaborative Governance adalah pendekatan mendasar untuk memahami kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam urusan publik, yang memiliki karakteristik tertentu dalam interaksi antar aktor, seperti yang dijelaskan oleh Silvia dalam (Avitadira & Indrawati, 2023). Konsep ini juga merupakan upaya penyelesaian permasalahan dengan memastikan keterwakilan peran dari masing-masing pihak yang berkepentingan.

Collaborative Governance menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan. Salah satunya mengenai pengelolaan sampah. Di perkotaan, keberlanjutan pengelolaan sampah menjadi tantangan yang sulit diselesaikan

sehingga diperlukan adanya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait (Hayamadi et al., 2024). Dalam menciptakan suatu sistem yang efisien, efektif, dan berkelanjutan maka menurut konsep *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan kerja sama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan organisasi non pemerintah (NGO). Selain itu, strategi pengelolaan sampah berbasis *Collaborative Governance* juga dapat diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan sampah yang menjadi perhatian utama.

Dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan, pemerintah tidak bisa menjadi tumpuan utama untuk menyelesaikannya (Astuti et al., 2020). Dibutuhkan adanya peran *stakeholders* lain dalam mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disporapar, hadir dengan program PING untuk mengajak instruktur senam dalam memenuhi minat senam masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Kompleksitas permasalahan kesehatan membuat pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah dengan program dari pemerintah saja, melainkan perlu partisipasi *stakeholders* lain.

Dalam program PING ini melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Disporapar Kabupaten Pamekasan dengan media

online yaitu portal berita online Yakuza.id, Instagram, YouTube, serta kecamatan sebagai penyebarluasan informasi. Serta bekerja sama dengan sanggar-sanggar senam di Kabupaten Pamekasan sebagai pihak swasta, yakni Rhenk Shera, Raisha, Arumi, Harmoni, dan Sagita. Disporapar Kabupaten Pamekasan berperan sebagai instansi yang membuat, menaungi, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini. Kemudian media online yaitu Yakuza.id, sosial media Instagram dan Youtube Disporapar Kabupaten Pamekasan, serta kecamatan sebagai penyebar informasi mengenai program ini. Pihak swasta yang berkolaborasi dalam program ini adalah sanggar-sanggar senam di Kabupaten Pamekasan sebagai penyedia instruktur senam.

Kolaborasi bisa menguntungkan berbagai pihak yang berkaitan. Disporapar Kabupaten Pamekasan terbantu dalam melayani masyarakat sebagai perwujudan pelayanan publik melalui program ini. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang di dalamnya terdapat tugas khusus yang diberikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, Disporapar Kabupaten Pamekasan membuat program ini dalam rangka memenuhi tugas tersebut. Kemudian bagi sanggar senam, pemerintah memberikan kesempatan bagi sanggar senam untuk mendapatkan pendapatan

yang dapat membantu perekonomian. Bagi masyarakat sebagai penerima layanan, tentunya akan merasa dilayani dengan adanya fasilitas instruktur senam gratis sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar instruktur senam.

Masyarakat yang mengajukan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar instruktur, yang perlu disiapkan hanyalah tempat pelaksanaan senam serta barang-barang yang memang dibutuhkan menyesuaikan keinginan masing-masing. Barang-barang yang biasanya digunakan adalah *speaker* dan *microphone*. Terkadang di tempat-tempat tertentu, instruktur mendapatkan konsumsi dari pihak yang mengajukan namun hal tersebut bukan kewajiban yang harus dipenuhi, jadi menyesuaikan pihak yang melakukan pengajuan. Berikut adalah salah satu pelaksanaan kegiatan program Pelayanan Instruktur Senam Gratis.



Gambar 1.2 Pelaksanaan Kegiatan Program PING
Sumber: Disporapar Kabupaten Pamekasan

Pelaksanaan program PING ini sendiri mengalami berbagai permasalahan, seperti sosialisasi mengenai program ini juga masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan yang masuk hingga tahun 2024, masih jarang oleh sekolah. Jadi bisa dikatakan bahwa sosialisasinya belum merata dilakukan. Sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan ke berbagai sekolah dan juga desa namun hanya sekedar pemberian brosur yang memang rutin dicetak setiap awal tahun. Brosur tersebut dibagikan ke sekolah-sekolah dan desa namun penyerahannya juga hanya sebatas dititipkan saja dan tentunya brosur tersebut belum tentu tersampaikan kepada guru, kepala sekolah, atau kepala desa. Hal tersebut memungkinkan tidak sampainya informasi mengenai program PING ini kepada sekolah atau desa. Keterangan ini disampaikan oleh salah satu pegawai Disporapar. Seharusnya pihak Disporapar melakukan sosialisasi dengan pemberian materi mengenai program ini kepada perangkat desa ataupun guru di sekolah. Cara tersebut lebih efisien daripada hanya sekedar pembagian brosur.

Kemudian mengenai pencairan honor instruktur senam dicairkan dengan waktu yang tidak menentu.

“Untuk honor instruktur senam itu cairnya tidak menentu, kadang 2 bulan kadang 3 bulan jadi dikumpulkan dulu. Tapi kalau 1 bulan tidak pernah”
(Ibu Fefem, Instruktur Senam, 21 Januari 2025).

Berdasarkan penuturan Ibu Fefem selaku salah satu instruktur senam di bawah naungan Disporapar Kabupaten Pamekasan, honor dicairkan dua atau tiga

bulan sekali namun tidak pernah dicairkan dalam satu bulan. Sebenarnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi sebagian instruktur, namun hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada ketentuan dalam pencairan honor instruktur.

Pada awal pembentukan program PING ini, terdapat sebuah kesepakatan yakni ingin memperkenalkan senam kepada desa-desa yang mungkin banyak masyarakatnya tidak mengerti bahkan tidak pernah melakukan senam. Instruktur yang tergabung juga menyetujui hal tersebut. Namun seiring berjalannya program ini, banyak desa-desa yang tidak bisa melakukan pengajuan karena terdapat minimal peserta jika ingin pengajuannya diterima.

“Kapasitas untuk peserta senam yang kuotanya terlalu banyak jadi banyak yang mundur dan banyak yang tidak disetujui untuk minta instruktur senam gratis”

(Ibu Fefem, Instruktur Senam, 21 Januari 2025)

Pada awal berjalannya program, minimal peserta adalah 30 orang. Banyak desa yang mengajukan instruktur senam gratis ketika ada acara-acara, seperti di bulan agustus memperingati kemerdekaan. Namun seiring berjalannya program ini, minimal peserta dinaikkan menjadi 50 orang, kemudian 75 orang, dan terakhir 100 orang. Sehingga pengajuan instruktur senam gratis ke desa itu jadi berkurang karena memang pengajuannya ada yang ditolak. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi kantor-kantor pemerintahan daerah yang biasanya pengajuannya selalu diterima. Sebenarnya tertolaknya pengajuan ini tidak

seharusnya terjadi, mengingat masyarakat juga ada yang memerlukan fasilitas ini. Jika hanya permasalahan administrasi, pihak Disporapar Kabupaten Pamekasan bisa melakukan revisi pada kebijakan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dinamika kolaborasi dalam program Pelayanan Instruktur Senam Gratis untuk mendukung hidup sehat masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika kolaborasi *stakeholders* dalam program Pelayanan Instruktur Senam Gratis di Kabupaten Pamekasan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan *stakeholders* dalam mendukung hidup sehat masyarakat dalam program Pelayanan Instruktur Senam Gratis

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan penelitian di atas, peneliti mempunyai pandangan tentang manfaat yang akan dicapai melalui penulisan penelitian ini. Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam pengimplementasian pengetahuan peneliti mengenai *Collaborative Governance* dalam program Pelayanan Instruktur Senam Gratis untuk mendukung hidup sehat masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di program Pelayanan Instruktur Senam Gratis untuk mendukung hidup sehat masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang dapat dijadikan sebuah pedoman serta mampu menjadi sebuah solusi dalam masalah pelaksanaan *Collaborative Governance* di program Pelayanan Instruktur Senam Gratis untuk mendukung hidup sehat masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi peneliti mengenai implementasi *Collaborative Governance* dalam program Pelayanan Instruktur Senam Gratis untuk mendukung hidup sehat masyarakat di Kabupaten Pamekasan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah sarana pengembangan ilmu

pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari selama di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber ataupun referensi penelitian sejenis lainnya di masa yang akan datang.